JURNAL MAHKOTA AGRIBISNIS
Vol. 1, No. 2, Maret 2026, pp. 30-39
ISSN: 3124-0836

Upaya Pengembangan Usaha Tani Padi Sawah dan Padi Ladang di Provinsi Kalimantan Tengah

Riska Elsa Rianty Sinaga[a,1*], Andereas Siagian[b,2], Nelva Meyriani Ginting[c,3], Mukhlis Halawa[d,4]

[a,b,c,d] Universitas Mahkota Tricom Unggul
*riskaelsa15@gmail.com

Abstract

Rice is a major food commodity that plays a vital role in national food security. Central Kalimantan Province has great potential for the development of irrigated and upland rice farming through various government programs. This study aims to examine efforts to develop irrigated and upland rice farming in Central Kalimantan Province. The research method used is a descriptive method employing a literature review and documentation from various relevant sources. The results of the study indicate that the development of irrigated rice is carried out through the One Million Hectare PLG Program, the Rice Field Expansion Program, and the Food Estate initiative, while the development of upland rice is conducted through the assessment of dryland farming systems and the implementation of Integrated Crop Management (ICM). However, the implementation of these programs still faces challenges such as low productivity, limited agricultural infrastructure, and unfavorable land conditions.

Keywords**:** *paddy rice, upland rice, agricultural development, Central Kalimantan*

1. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia pangan, sumber pendapatan masyarakat, maupun penyedia lapangan kerja. Salah satu subsektor pertanian yang memiliki peranan strategis adalah subsektor tanaman pangan, khususnya komoditas padi. Beras sebagai hasil utama tanaman padi merupakan bahan pangan pokok masyarakat Indonesia sehingga keberadaannya sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional (Sahimudin, 2015).

Kebutuhan beras di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Namun, peningkatan kebutuhan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan produksi padi yang stabil. Produksi padi nasional masih mengalami fluktuasi akibat perubahan iklim, serangan hama dan penyakit tanaman, alih fungsi lahan pertanian, serta keterbatasan sarana dan prasarana pertanian. Selain itu, menurunnya kualitas lahan dan terbatasnya ketersediaan air irigasi juga menjadi faktor penghambat dalam peningkatan produksi padi di Indonesia (Suryana, 2007).

Sektor pertanian juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dipengaruhi oleh subsektor tanaman pangan, terutama komoditas padi sebagai salah satu komoditas utama. Oleh karena itu, peningkatan produksi dan produktivitas padi menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan pertanian nasional. Upaya peningkatan produksi padi tidak hanya dilakukan melalui intensifikasi pertanian, tetapi juga melalui pengembangan kawasan pertanian baru yang potensial.

Perkembangan luas lahan, produksi, dan produktivitas padi di Indonesia selama tahun 2019–2021 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Luas lahan tanaman padi mengalami penurunan setiap tahunnya,

sedangkan produksi padi mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan kembali menurun pada tahun 2021. Di sisi lain, produktivitas padi menunjukkan peningkatan meskipun relatif kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas produksi pangan nasional.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan tanaman pangan, khususnya padi sawah dan padi ladang. Pemerintah menetapkan Kalimantan Tengah sebagai salah satu kawasan lumbung pangan nasional melalui program food estate. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan nasional melalui pengembangan kawasan pertanian terpadu yang didukung dengan mekanisasi pertanian modern dan optimalisasi pemanfaatan lahan.

Perkembangan luas panen, produksi, dan produktivitas padi sawah dan padi ladang di Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2016–2020 juga mengalami fluktuasi. Pada padi sawah, luas panen tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan produksi sebesar 6.599.440 kuintal, sedangkan pada padi ladang luas panen tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan produksi sebesar 1.680.830 kuintal. Namun, pada tahun-tahun berikutnya luas panen dan produksi cenderung mengalami penurunan. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh perubahan iklim, keterbatasan sarana produksi, rendahnya penggunaan teknologi pertanian modern, serta pengelolaan usahatani yang belum optimal.

Pemerintah telah melakukan berbagai program pengembangan seperti penggunaan benih unggul, perbaikan jaringan irigasi, bantuan alat dan mesin pertanian, serta pengembangan kawasan food estate. Akan tetapi, hingga saat ini perkembangan produksi dan produktivitas padi sawah maupun padi ladang di Provinsi Kalimantan Tengah masih menunjukkan kondisi yang belum stabil. Selain itu, masih terdapat perbedaan tingkat produktivitas antara padi sawah dan padi ladang yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengembangan belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi petani.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pengembangan usahatani padi sawah dan padi ladang di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengetahui program-program pengembangan yang telah dilakukan serta mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan produksi dan produktivitas padi masih mengalami fluktuasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi dalam mendukung pengembangan usahatani padi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Metodologi

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah yang dipilih secara purposive karena merupakan salah satu wilayah pengembangan usahatani padi sawah dan padi ladang serta kawasan program food estate di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan dokumentasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pandih Batu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mengkaji program-program dan upaya yang dilakukan dalam pengembangan usahatani padi sawah dan padi ladang di Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Potensi Pengembangan Padi

Salah satu program untuk meningkatkan produksi padi adalah melalui Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL PTT). Melalui penerapan teknologi PTT padi produksi dapat meningkat 10 hingga 15 persen. Budidaya padi dengan pendekatan PTT meliputi dua komponen teknologi, yaitu komponen utama dan alternatif. Komponen utama dianjurkan untuk diterapkan pada budidaya padi, sedangkan komponen alternatif disesuaikan dengan kondisi setempat. Komponen utama meliputi: a). Penggunaan varietas unggul hibrida dan Inbrida; b). Benih bermutu dan berlabel; c). Pemberian bahan organik melalui pengembalian jerami ke sawah dengan cara dibenamkan atau dalam bentuk kompos atau dijadikan pakan

ternak yang kotorannya diolah menjadi pupuk kandang; d). Pengaturan populasi tanaman, antara lain dengan pengaturan jarak tanam atau jajar legowo; e). Pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah; f). Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan pendekatan Pengelolaan Hama Terpadu (PHT);

Adapun komponen alternatifnya adalah a). Pengolahan tanah sesuai musim dan pola tanam; b). Penggunaan bibit muda, tanam bibit satu hingga tiga batang per rumpun; c). Penyiangan; d). Panen tepat waktu dan gabah segera dirontok (Purba, 2015).

3.2. Program Pengembangan Padi Sawah di Provinsi Kalimantan Tengah

3.2.1. PLG Sejuta Hektar Kalimantan Tengah

Pemerintah pada masa Orde Baru pernah melaksanakan program perluasan sawah di lahan rawa gambut yang dikenal dengan proyek pengembangan lahan gambut (PLG) satu juta hektare di Kalimantan Tengah (Suriadikarta, 2006). Proyek ini dilaksanakan berdasarkan Keppres No. 82 tahun 1995 dan merupakan kompensasi penciutan lahan sawah intensif di Pulau Jawa. Luas lahan gambut untuk proyek ini seluas 1.119.493 ha. Proyek ini bertujuan mengkonversi hutan rawa gambut *(wet land)* di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sawah guna mempertahankan swasembada beras yang telah dicapai Indonesia pada tahun 1984. Pembukaan lahan rawa ini dimulai sejak 4 Januari 1996 dengan pembuatan jaringan irigasi sepanjang 187 km yang memotong dan menghubungkan Sungai Sebangau, Sungai Kahayan, Sungai Kapuas dan Sungai Barito serta anak-anak sungainya. Sistem tata air yang dikembangkan pada kawasan PLG adalah sistem tata air tertutup, artinya air yang masuk dan keluar dari sistem tata air dapat dikontrol untuk optimasi proses pencucian gambut. Tanah di lokasi ini berupa rawa yang didominasi gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter (30%), ketebalan kurang dari 1,5 meter (25%) dan tanah sulfat masam.

Pengembangan proyek lahan gambut sejuta hektar ini memiliki dua program kegiatan yang dilakukan. Program kegiatan yang pertama adalah membangun sauran irigasi dan menghubungkannya ke sungai besar dan anak-anak sungai supaya pengairannya cukup. Sedangkan progran kegiatan yang kedua adalah melaukan pencetakan sawah baru untuk dilakukannya penanaman padi kepedannya.

PLG Sejuta Hektar dimulai tahun 1995 pada jaman Soeharto. Kegagalan PLG tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Dari target luasan yang direncanakan sebesar 1,45 juta ha hanya dapat terealisasikan sekitar 110 ribu ha lahan. Beberapa isu yang dihadapi dan dampak yang ditimbulkan akibat proyek ini adalah: A. Isu lingkungan, yaitu Proyek ini dilaksanakan tanpa adanya analisis dampak lingkungan yang matang, ketidakcocokan lingkungan gambut untuk digarap menjadi lahan pertanian, banyak lahan yang terlantar akibat tidak bisa dikelola menjadi lahan pertanian dan menyebabkan lahan terlantar tersebut rawan akan terjadinya kebakaran, tercatat kebakaran hutan dan lahan besar muncul akibat pembukaan lahan gambut besar-besaran pada saat itu. Hampir 80% dari area PLG terbakar hebat selama musim kering 1997/1998. Kebakaran di area PLG sendiri melepaskan emisi sebesar 0,12–0,15 Gt karbon ke atmosfer, pembuatan saluran kanal sepanjang 187 km pada masa program PLG mengakibatkan pirit terekspos sehingga menjadikan tanah sangat asam (pH < 3,5). B. Isu sosial, yaitu Para transmigran kesulitan menggarap lahan gambut akibat kurangnya pemahaman terhadap kondisi lahan serta ketidakcocokan lingkungan gambut untuk digarap menjadi lahan pertanian. Lahan yang seharusnya digarap dan direncanakan ditanami padi malah menjadi lahan tidur yang sulit dikelola, sehingga membuat masyarakat lebih memilih melakukan penebangan liar hutan gambut (Suriadikarta, 2009).

Adapun kelebihan dari program Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar Kalimantan Tengah adalah adanya pemanfaatan lahan gambut yang dulunya tidak dikelola sama sekali dan sekarang menjadi bermanfaat yang akan direncanakan untuk dijadikan sebagai lahan penanaman padi.

Menurut Siswono Yudo Husodo Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH), proyek ini berakhir dengan kegagalan total. Penyebab kegagalan ini adalah lahan gambut terbukti tidak cocok untuk penanaman padi. Sekitar separuh dari 15.594 keluarga transmigran yang dahulu ditempatkan pada kawasan tersebut meninggalkan lokasi. Selain itu, penduduk setempat mengalami kerugian akibat kerusakan sumber daya alam di kawasan tersebut serta dampak hidrologi dari proyek tersebut.

3.2.2. Program Cetak Sawah

Salah satu tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional adalah degradasi lahan, alih fungsi lahan subur, dan keterbatasan sumber daya lahan potensial (Mulyani ddk, 2011). Upaya yang dilakukan pemerintah adalah program perluasan lahan sawah yang dikenal dengan program cetak sawah. Program perluasan sawah atau cetak sawah adalah suatu usaha penambahan luas baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan untuk pertanian dengan sistem sawah (Ditjen PSP, 2016). Program ini dilaksanakan sejalan dengan pengendalian konversi lahan dan perlindungan sawah produktif, intensifikasi pertanian, dan penyediaan infrastruktur pertanian.

Cetak sawah yang dilaksanakan pada periode 1999-2002 berhasil mencetak sawah dengan luas rata-rata 4.000 ha/tahun (Agus, 2007) dan pada periode 2006-2016 luas cetak sawah rata-rata 40.000 ha/tahun (Kementan, 2014). Secara umum tujuan dan sasaran kegiatan cetak sawah adalah menambah luas baku lahan sawah dan menghasilkan produksi utama berupa padi pada sawah baru sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Berdasarkan pengalaman atas kegagalan PLG satu juta hektare sebelumnya, maka cetak sawah direncanakan dan dirancang serta dilaksanakan dengan baik, cermat dan seksama. Pelaksanaan cetak sawah berfokus pada pengembangan lahan yang memiliki sumber air, baik sumber air permukaan maupun air tanah.

Kabupaten Katingan merupakan salah satu lokasi cetak sawah di Provinsi Kalimantan Tengah. Sejak tahun 2006-2017 (Ditjen PSP, 2016b) Kabupaten Katingan mendapatkan alokasi cetak sawah seluas 9.602 hektare yang tersebar di enam kecamatan yaitu Kecamatan Katingan Kuala, Pulau Malan, Katingan Tengah, Mendawai, Tasik Payawan, dan Tewang Siwalang Garing. Anggaran biaya untuk pelaksanaan program cetak sawah di Kabupaten Katingan pada tahun 2016 sebesar Rp141.635.000.000.

Lahan hasil program cetak sawah pada tahun 2016 di Kecamatan Katingan Kuala seluas 1.003 hektare sudah diserahkan kepada petani peserta. Setiap peserta mendapatkan alokasi seluas satu hektare lahan. Lahan tersebut merupakan lahan milik mereka yang sebelumnya tidak dimanfaatkan atau dimanfaatkan bukan untuk lahan budi daya. Jadi program perluasan lahan tidak menambah luas lahan yang dimiliki petani tapi menambah total penguasaan lahan yang dimanfaatkan untuk budi daya. Peserta cetak sawah menilai adanya tambahan satu hektare lahan ini secara ekonomi dirasakan membantu petani yaitu sebagai sumber mata pencaharian baru maupun sebagai sarana mencukupi kebutuhan pangan setempat.

Program perluasan lahan pada tahun 2016 di Kecamatan Katingan Kuala telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan berhasil menambah luas sawah 1.003 ha. Perluasan lahan sawah tersebut terjadi melalui perubahan fungsi lahan milik masyarakat sasaran program cetak sawah dari yang sebelumnya tidak dimanfaatkan (lahan tidur) atau dimanfaatkan bukan untuk budidaya padi (sawah) namun sebagian besar responden sasaran program, lahan sawahnya hanya ditanami satu kali tanam padi, dan sebagian kecil responden lahan sawahnya ditanami dua kali tanam dengan produktivitas rata-rata hanya sekitar 2 ton per hektare.

Rendahnya produktivitas dan keuntungan usahatani padi di lahan sawah program cetak sawah di Kecamatan Katingan Kuala karena perluasan lahan di kecamatan tersebut menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan modal usahatani, jalan usahatani dan sarana irigasi yang tidak memadai, ketersediaan alat dan mesin pertanian yang tidak mencukupi kebutuhan, akses pasar dan lokasi perluasan lahan jauh dan tanah yang relatif tidak begitu subur.

Cetak sawah adalah langkah yang mutlak perlu. Strategi untuk kebutuhan penyediaan pangan jangka panjang, dan menawarkan solusi kemandirian dan keswadayaan dalam hal pangan. Semua itu menjadi dasar pokok bagi kemandirian bangsa jauh ke depan. Keuntungan atau kelebihan yang bisa diperoleh dari program cetak sawah ini ialah meningkatkan rasio pemanfaatan tanah, mengurangi jumlah lahan terlantar, menambah luas areal tambah tanam, meningkatkan produksi padi secara nasional, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Menurut Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian (2018) ada beberapa rincian program kegiatan yang dilakukan dalan program cetak sawah adalah sebagai berikut; a) administrasi dan perencanaan; b) pengecekan bersama kondisi awal (mutual check 0%); c) konstruksi, ada dua kegiatan yang dilakukan pada

saat konstruki yaitu pekerjaan konstrusi cetak sawah irigasi dan pekerjaan konstrusi cetak sawah pada daerah rawa; d) pemanfaatan sawah baru.

3.2.3. Program *Food Estate*

Food estate merupakan salah satu Program Strategis Nasional 2020-2024 yang bertujuan membangun lumbung pangan nasional. Pembangunan *food estate* di Provinsi Kalimantan Tengah tidak akan membuka kembali lahan eks pengembangan lahan gambut (PLG). Pembangunan akan dilakukan dengan intensifikasi lahan pertanian atau mengoptimalkan pemanfaatan lahan eks PLG dan non eks PLG yang sudah ada dengan cara meningkatkan indeks pertanaman. Pengoptimalan itu dilakukan dengan penerapan teknologi 4.0, seperti pemberian bibit unggul (perbaikan varietas), pemupukan berimbang, dan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan), sehingga ditargetkan produktivitas bisa mencapai 7 ton/hektar. Kegiatan intensifikasi awal tahun 2020 ini seluas 30.000 hektar, meliputi 20.000 hektar di Kabupaten Kapuas dan 10.000 hektar di Kabupaten Pulang Pisau. Pemerintah Pusat juga merencanakan peningkatan penanganan pascapanen berupaya mewujudkan pertanian modern agar tidak kalah dengan pertanian di Pulau Jawa.

Food estate berbasis korporasi itu merupakan investasi terintegrasi dari hulu ke hilir sebagai upaya meningkatkan produksi pangan bagi masyarakat Indonesia. Pengembangan *Food estate* ini merupakan program dan sinergi seluruh komponen pada pemerintah pusat dan daerah dengan dukungan pengawasan serta pembiayaannya. Sinergi itu mulai dari sistem hulu, on farm, hilir, hingga distribusi pasar untuk meningkatkan kapasitas dan diversifikasi produksi pangan (Limpo, 2020). Selanjutnya Sarwo Edhy (2020), Peralatan dan mesin-mesin pertanian (alsintan) diperlukan untuk mendukung pembangunan *food estate*. Alsintan itu, antara lain traktor roda 4 dan 2, pompa air, rice transplatter, hand sprayer, dronetabur benih, dan combine harvester. Kementerian Pertanian juga menyiapkan benih sekitar 1.500 ton, dolomit 30.000 ton, pupuk hayati 150.000 ton, urea 6000 ton, NPK 4500 ton, dan pupuk herbisida 120.000 ton. Lahan ini akan dikerjakan mulai tahun 2020 ini sampai 2022. Targetnya, pada tahun 2022 mendatang lahan seluas 165.000 hektar sudah bias dioptimalkan produksinya. Rinciannya, 85.500 hektar merupakan lahan fungsional yang siap digunakan untuk berproduksi setiap tahun. Dari jumlah tersebut, 28.300 hektar masih dalam kondisi irigasi baik dan 57.200 hektar perlu dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi. Sementara, 79.500 lahan sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (*land clearing*) atau tanpa perlu dilakukan pencetakan sawah kembali. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung Pemerintah dalam menciptakan kawasan yang mengintegrasikan pertanian, perkebunan, dan peternakan guna menjamin kebutuhan dan ketahanan pangan Nasional.

Ada beberapa kelebihan atau keuntungan yang diperoleh dari program *food estate* ini yaitu; 1) pemerintah bisa membuka lahan tanaman pangan baru dengan lebih cepat dan meningkatkan produksi tanaman pangan. Sampai dengan tahun 2010, tercatat lahan pertanaman di Indonesia adalah seluas 7 juta hektar. Padahal, di satu sisi terjadi alih fungsi lahan pertanian mencapai 100 ribu hektare per tahun, bahkan lebih pada saat ini; 2) pemerintah bisa menarik minat investor (pemodal) untuk menggerakkan kegiatan ekonomi khususnya di daerah luar Jawa; 3) bisa menambah pendapatan pemerintah dan ikut meningkatkan pendapatan petani di kawasan *food estate*; 4) meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia (jika pemerintah benar-benar bisa mengkontrol distribusi hasil pertanian).

Food estate ini merupakan suatu daerah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di Indonesia. Lokasi lumbung pangan baru yang juga merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2020 hingga 2024 tersebut berada di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Secara rinci, luas lahan 1.210 hektar siap dikerjakan pada tahun 2020, 33.335 hektar lahan dikerjakan pada tahun 2021, serta 22.655 hektar akan dikerjakan tahun 2022. Adapun total kebutuhan anggaran untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp 1,05 triliun, pengembangan program *food estate* ini dilakukan bersama Kementerian BUMN melalui skema investasi. Kementerian PUPR mengembangkan sarana dan prasarana dasar seperti perbaikan saluran-saluran irigasi di sekitar kawasan tersebut baik jaringan irigasi sekunder maupun primer.

Desa Belanti Siam merupakan salah satu lumbung padi nasional dilihat dari data BPS bahwa produksi padi sawah di Desa Belanti Siam sangat tinggi, terlebih lagi sekarang pemerintah memilih lokasi tersebut menjadi salah satu lumbung padi nasional (*food estate*) karena selain produksi nya lahan nya juga luas dan memadai. Akan tetapi, petani masih mengalami kesusahan, terutama saat sudah melakukan penanaman petani sering kali kekurangan dan kesusahan pupuk, pemerintah menyediakan pupuk subsidi akan tetapi, ketersediaan nya tidak selalu ada, akses petani terhadap pemasaran padi di Desa Belanti Siam sangat berpengaruh pada petani, sebagian Petani masih bergantung kepada tengkulak, sedangkan harga di tengkulak sangat rendah dibandingkan di jual ke luar daerah. Strategi yg harusnya di kembangkan di tempat ini, bahwa pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan pembangunan pertanian, seperti jadwal pemberian pupuk subsidi rutin, dan salah satunya juga pembuatan lumbung padi di mana pemerintah membangun tempat penampungan padi dan dibeli oleh pemerintah dengan harga yg sudah di tetapkan. Berikut adalah kegiatan *food estate* beserta jumlah kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang mengikuti program *food estate* di Desa Balanti Siam, dapat di lihat pada tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Unggul dan Jumlah Poktan/Gapoktan Dalam Kegiatan *Food Estate* di Desa Balanti Siam Tahun 2020.

No	Poktan/Gapoktan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Sumber Mulyo	12	51.0	4.3
2.	Harapan Warga	3	12.6	4.2
3.	Mekar Jaya	5	20.5	4.1
4.	Karya Tani	6	24.0	4.0
5.	Jaya Sakti	6	24.3	4.0
6.	Sumber Rejeki	2	9.6	4.8
7.	Sumber Makmur 2	4	17.2	4.3
8.	Gapoktan Mandiri Bersama	9	38.3	4.3
9.	Sido Mulyo	91	268.5	3.0
10.	Sumber Makmur	105	351.8	3.4
11.	**Rukun Sentosa**	**105**	**462.0**	**4.4**
12.	Karya Bakti	90	256.5	3.0
13.	Sri Makmur	69	200.1	3.0
14.	Karya Makmur	55	159.5	3.0
15.	Karya Baru	44	118.8	2.7
16.	Margamulyo	88	242.0	2.8
17.	Panca Makmur	68	217.6	3.2
18.	Sido Rukun	67	234.5	3.5
19.	Sido Mekar	70	168.0	2.4
20.	Karya Jaya	47	105.8	2.3
	Jumlah	**940**	**2.971.6**	**70.7**

Sumber: Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pandih Batu, 2024

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa terdapat 19 kelompok tani dan 1 gabungan kelompok tani yaitu gapoktan Mandiri Bersama yang mengikuti program *food estate* di Desa Balanti Siam. Kelompok tani memiliki luas panen dan produksi padi terbanyak adalah kelompok tani Rukun Sentosa dengan luas panen seluas 105 ha dan produksi sebanyak 4.602 Ton serta kelompok tani yang memiliki luas panen dan produksi paling sedikit adalah kelompok tani Sumber Rejeki yaitu dengan luasan seluas 2 Ha dan produksi sebanyak 96 Ton.

3.3. Program Pengembangan Padi Ladang di Provinsi Kalimantan Tengah

3.3.1. Pengkajian Sistem Usahatani Padi di Lahan Kering

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang berpotensi cukup besar dalam upaya peningkatan produksi padi nasional, karena memiliki lahan kering seluas 14,63 juta hektar. Salah satu upaya yang ditempuh oleh BPTP Kalimantan Tengah dalam peningkatan produksi padi adalah melaksanakan Pengkajian Sistem Usahatani Padi di Lahan Kering. Pengkajian dilaksanakan pada musim hujan dengan luas hamparan 5,3 hektar yang melibatkan 12 petani kooperator. Rendahnya produksi padi ladang di Provinsi Kalimantan Tengah disebabkan masih banyaknya yang menanami lahan kering dengan padi ladang varietas lokal yang berumur panjang.

Pada tanaman padi ladang pasokan air sulit di kendalikan sesuai dengan kebutuhan tanaman karena terbatasnya sarana pengairan sehingga pasokan air sepenuhnya tergantung pada curah hujan. Konsekuensinya adalah luas tanaman, produktivitas dan produksi padi ladang sangat di pengaruhi oleh curah hujan, dengan kata lain variabilitas produksi padi padi ladang berkorelasi kuat dengan variasi curah hujan. Untuk menekan resiko gagal panen akibat faktor iklim maka petani harus menyesuaikan kegiatan usaha taninya dengan kondisi iklim yang di hadapi. Dalam kaitan ini diperlukan inovasi teknologi yang adaptif terhadap variasi iklim, misalnya, jika kondisi iklim lebih kering dibanding biasanya maka petani harus menggunakan varitas padi relatif tahan kekeringan. Akan tetapi inovasi teknologi yang adaptif terhadap variasi iklim tersebut sejauh ini cukup terbatas untuk padi ladang. Areal tanaman padi ladang umumnya terdapat pada daerah lahan kering yang cukup sulit dijangkau sehingga transfer teknologi relatif lambat akibat terbatasnya sarana transportasi dan kelembagaan pendukung transfer teknologi.

Menurut Krismawati, A. 2007 dalam penelitiannya yang berjudul "Kajian Teknologi Usahatani Padi di Lahan Kering Kalimantan Tengah" di simpulkan bahwa variets dan dosis pupuk berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan vegetatif (tinggi tanaman dan jumlah anakan) maupun komponen hasil (jumlah malai per rumpun, jumlah gabah per malai, bobot 1.000 butir dan hasil gabah per hektar).

3.3.2. Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)

Potensi lahan kering yang sesuai untuk arahan pengembangan pertanian adalah seluas 2.547.700 Ha (17%) yang tersebar di seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah. Sementara yang sudah dimanfaatkan untuk kegiatan usahatani padi ladang baru mencapai 81.419 Ha, dengan produktivitas lahan kering (padi gogo) sangat rendah baru mencapai 1- 2 ton/ha gkg. Strategi pemanfaatan potensi sumber daya lahan di Kalimantan Tengah untuk pengembangan padi secara lebih operasional adalah melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). PTT Padi merupakan model pendekatan usaha tani padi yang bersifat dinamis, mengintegrasikan berbagai komponen teknologi yang saling bersinergi sehingga mampu memecahkan persoalan setempat, memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah (Bhermana, A, 2009).

Luas areal lahan kering di Kalimantan Tengah mencapai 11.668.300 Ha (77%) dari luas wilayah yang mencapai lebih dari 15 juta Ha. Lahan kering yang telah dimanfaatkan untuk beberapa komoditas baik untuk tanaman pangan dan hortikultura termasuk juga perkebunan baru mencapai 3.546.867 Ha. Bila dibandingkan dengan luas wilayah Kalimantan Tengah, maka kawasan-kawasan yang sudah termanfaatkan untuk pertanian relatif masih sedikit yaitu sebesar 23%. Namun angka tersebut belum termasuk konversi lahan untuk non pertanian seperti kawasan pemukiman dan pengembangan kota. Bila dibandingkan penggunaan lahan untuk padi ladang dengan luasan yang telah dimanfaatkan, baru mencapai 81.419 Ha atau 2,3%. Apabila luasan padi ladang yang telah dimanfaatkan dibandingkan dengan luas lahan kering, baru mencapai 0,7%. Kecilnya persentase pemanfaatan lahan kering untuk tujuan pengembangan padi ladang di Kalteng, membuka peluang dan kesempatan dalam pemanfaatan potensi lahan kering yang masih terbuka luas (Bhermana, A, 2009).

PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) padi sawah merupakan sebuah inovasi untuk menunjang peningkatan produksi padi. Hal ini dilatarbelakangi karena beras sebagai bahan pangan yang berasal dari padi merupakan bahan pangan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu sebagai bahan pangan pokok utama padi memegang posisi yang strategis untuk dikembangkan. Kelebihan dari PTT

(Pengelolaan Tanaman Terpadu) padi sawah adalah untuk upaya peningkatan efisiensi usaha tani padi sawah dengan menggabungkan berbagai komponen teknologi yang saling menunjang dan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya alam secara bijak agar memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman.

Adapun kegiatan yang dilakukan saat melaksanakan program pengelolaan tanaman terpadu antara lain; 1) mengelola sesuai musim dan pola tanaman; 2) menanam bibit yang muda; 3) menanam 1-3 batang per rumpun; 4) melakukan pengairan; 5) melakukan penyiangan menggunakan landak/gasrok; 6) memanen dengan tepat waktu; 7) perontokan gabah.

3.4. Kebijakan Pengembangan Tanaman Padi

Upaya penguatan ketahanan pangan mencakup aspek ketersediaan atau kecukupan, kontinuitas, distribusi, kualitas, dan keamanan/kesehatan. Diversifikasi konsumsi makin perlu digalakan di masa yang akan datang untuk mengurangi laju peningkatan kebutuhan beras sehingga melanggengkan swasembada beras. Kebijakan pengembangan padi diarahkan pada: 1) membangun dan mengembangkan kawasan agribisnis padi yang modern, tangguh dan memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik bagi petani; 2) meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani melalui adopsi inovasi unggul dan berdaya saing; 3) memanfaatkan sumberdaya alam produktif, dan berkelanjutan yang dapat mendukung ketahanan ekonomi dan pelestariannya dan lingkungan; 4) memberdayakan petani dan masyarakat pedesaan; 5) mengembangkan kelembagaan dan kemitraan yang modern, tangguh, partisipatif, efisien dan produktif. secara optimal (efisien, Pengembangan agribisnis beras perlu didukung oleh iklim berusahatani yang kondusif.

Kebijakan makro yang perlu dipertahankan adalah: 1) pembatasan impor untuk mengendalikan keseimbangan pasokan dan permintaan pada saat periode panen raya; 2) perlindungan terhadap petani melalui tarif untuk menjaga daya saing produksi beras dalam negeri, 3) harga dasar pembelian, 4) mencegah penyelundupan, dan 5) standarisasi produk sesuai dengan *Good Agricultural Practices (GAP)* akan mendorong peningkatan mutu produksi beras dalam negeri dan menghambat masuknya produk inferior.

Di samping itu perlu dipertimbangkan subsidi output untuk menjamin petani mendapatkan harga produk yang menguntungkan bagi usahataninya. Pembatasan impor pada saat panen raya yang telah dilakukan selama ini cukup efisien menekan pasokan, sehingga harga gabah bertahan pada tingkat yang menguntungkan petani. Namun kebijakan tarif, harga dasar pembelian, dan pencegahan penyelundupan belum efektif pelaksanaannya. Harga produk petani biasanya berada di bawah harga dasar, bahkan pada saat panen raya di daerah-daerah sentra produksi sering terjadi harga jauh di bawah harga dasar.

Komoditas tanaman pangan impor sering membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang lebih murah karena pemerintah negara-negara eksportir melindungi petaninya secara baik dengan berbagai cara. Kondisi demikian mengakibatkan insentif yang diterima petani belum optimal, sehingga kurang mendorong gairah mereka untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usahataninya.

Realisasi produksi beras Indonesia pada tahun 2020 tidak mencapai target, yakni hanya 34,99 juta ton. Lebih mirisnya lagi, produksi tersebut juga mengalami penurunan dari tahun 2018 yang sebesar 37,90 juta ton. Penurunan tersebut tidak lain karena produksi padi mengalami penurunan dari 59,20 juta ton tahun 2018 menjadi 54,65 juta ton tahun 2020. Turunnya produksi ini disebabkan oleh turunnya luas panen dan produktivitas komoditas padi. Produktivitas ini juga merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi tingkat kesejahteraan petani, khususnya tanaman pangan. NTPP tahun 2020 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, dari 102,96 tahun 2018 menjadi 101,03 tahun 2020. Dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022, NTP ditargetkan dikisaran 102-104, di mana target tersebut juga merupakan target dari NTPP. Untuk mencapai target tersebut, maka perlunya meningkatkan produktivitas padi nasional.

Terdapat beberapa persoalan yang dihadapi dalam meningkatkan produksi padi. Permasalahan dalam faktor luas panen, di mana mengalami penurunan disebabkan oleh masih lemahnya implementasi UU No. 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan alih komoditi. Sedangkan

produktivitas disebabkan SDM yang didominasi pendidikan dasar, produksi benih varietas unggul jauh lebih rendah dari kebutuhan dan produktivitas hasil penelitian produksi benih varietas unggul tahun 2020 sedikit lebih rendah dari 2019, masih kurang akuratnya pendataan RDKK, serta bantuan alsintan masih terfokus pada pra panen.

Terdapat sekitar 16 Peraturan Pemerintah/Inpres/Kepres/ Kepmen untuk mengatur dan mengurangi laju konversi lahan. Namun belum ada data empiris yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut cukup efektif mengatur dan mengendalikan konversi lahan. Permasalahannya terletak pada pengawasan dan konsistensi penerapan hukum, apalagi dengan adanya UU Otonomi Daerah. Oleh karena itu, dukungan kebijakan pemerintah kepada pelaku agribisnis padi, baik masyarakat (petani) maupun swasta, akan mempercepat peningkatan investasi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan usahatani padi sawah dan padi ladang di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan melalui berbagai program pemerintah, seperti Program PLG Sejuta Hektar, Program Cetak Sawah, dan Program Food Estate pada padi sawah, serta pengkajian sistem usahatani lahan kering dan penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) pada padi ladang. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan luas lahan, produksi, produktivitas, serta mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional.

Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa program, seperti Program Cetak Sawah dan Food Estate, mampu memberikan kontribusi terhadap penambahan luas lahan dan peningkatan produksi padi di beberapa wilayah. Selain itu, penerapan teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) pada padi ladang juga berpotensi meningkatkan produktivitas usahatani. Namun, tidak semua program berjalan optimal. Program PLG Sejuta Hektar dinilai kurang berhasil karena kondisi lahan gambut yang kurang sesuai untuk budidaya padi serta menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan dan sosial. Secara umum, pengembangan usahatani padi di Kalimantan Tengah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya produktivitas, perubahan iklim, serta terbatasnya akses teknologi dan sarana produksi pertanian. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi pengembangan pertanian yang lebih berkelanjutan, terintegrasi, dan sesuai dengan kondisi wilayah agar program pengembangan usahatani padi dapat berjalan lebih efektif.

Acknowledgment

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan informasi dalam penyusunan penelitian ini, khususnya kepada instansi terkait di Provinsi Kalimantan Tengah serta berbagai pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data dan penyelesaian penelitian mengenai pengembangan usahatani padi sawah dan padi ladang.

References

[1] Agus, F., and A. Mulyani. 2007. Judicious use of land resources for sustaining Indonesian rice self sufficiency. Rice Industry, Culture and Environment, Book 1. Indonesian Center for Rice Research, Sukamandi, Indonesia.

[2] Badan Pusat Statistik Indonesia. 2022. Perkembangan Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi di Indonesia Tahun 2019-2021. BPS Indonesia.

[3] Damardjati, D.S., Marwoto, D.K.S. Swastika, D.M. Arsyad dan Y. Hilman. 2005. Prospek dan Arah Pengembangan dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.

[4] Bhermana, A. 2009. Potensi Pengembangan Wilayah Untuk Pertanian, Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan. BPTP Kalimantan Tengah. Palangkaraya.

[5] Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan T engah. 2022. Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang di Kalimantan Tengah 2016-2020. Kalimantan Tengah.

[6] Krismawati, A. 2007. Kajian Teknologi Usahatani Padi di Lahan Kering Kalimantan Tengah. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Balai Pengkajian Teknologi Kalimantan Tengah.

[7] Mulyani, A., N. Suharta, D. Kuncoro dan Z. Abidin. 2011. Identifikasi Karakteristik Potensi Lahan Sawah untuk Peningkatan dan Pengembangan IP-400 di Provinsi Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darusalam, skala 1:100.000. Program Insentif Riset Terapan. No.: 01/RISTEK/BBSDLP/2011. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan, Bogor.

[8] Purba, Tommy. 2015. Potensi Pengembangan Padi Sawah Varietas Unggul Baru Di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Agros Vol. 17, No. 1: 132-138.

[9] Sahimudin Najamuddin. 2015. Pengaruh Sektor Pertanian Padi Terhadap Pembangunan Ekonomi. STIE Mujahidin. Tolitoli.

[10] Suriadikarta, D.A. 2006. Pupuk Organik dan Pupuk Hayati. Bandung: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

[11] Suriadikarta, D.A., 2009, Pembelajaran dari Kegagalan Penangan Kawasan PLG Sejuta Hektar Menuju Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan, Pengembangan Inovasi Pertanian, 2(4), 229-242.

[12] Suryana. 2007. Ketahanan Pangan Nasional. Institut Pertanian Bogor. Bogor.